



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2022 - 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan menjaga tingkat inflasi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, perlu dilakukan langkah pengendalian inflasi daerah Tahun 2022-2024 secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa dalam upaya mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, diperlukan acuan dalam bentuk peta jalan (*roadmap*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jalan (*roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta jalan (*roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana pada diktum Kesatu bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Wali Kota Padang Nomor 522 Taun 2020 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Padang Tahun 2020-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Februari 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat
3. Ketua DPRD Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2022 - 2024

PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022-2024

Keterangan	Program Kerja	1. Keterjangkauan Harga	1. Melakukan koordinasi, sinkronisasi program dan penganggaran, dan harmonisasi kebijakan Daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang di dalam dokumen RKPd tahun 2021 - 2026	2. Optimalisasi Pasar Murah/Operasi Pasar 5 komoditas bahan makanan, pangan strategis (beras, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras) dengan memperhatikan permintan antar waktu dan antar kecamatan	1. a. Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah secara berkala ataupun insidental pada periode tertentu (kondisional) Monitoring harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat masyarakat yang diinput pada aplikasi pasarani d. Pemantauan harga komoditas pangan dan peternakan e. Distribusi Bahan Pangan Ke Masyarakat (komoditi)	Program Kerja	Strategi 4 K	a. Stabilitas Harga										
	Timeline Target	2024	2023	2022	2021	Program Kerja	Strategi 4 K	a. Stabilitas Harga										
Bappeda OPD terabung dalam TPID	Tertaskannya koordinasi, sinkronisasi program dan penganggaran, dan harmonisasi kebijakan Daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang di dalam dokumen RKPd tahun 2021 - 2026	Tertaskannya koordinasi, sinkronisasi program dan penganggaran, dan harmonisasi kebijakan Daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang di dalam dokumen RKPd tahun 2021 - 2026	Tertaskannya koordinasi, sinkronisasi program dan penganggaran, dan harmonisasi kebijakan Daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang di dalam dokumen RKPd tahun 2021 - 2026	Tertaskannya koordinasi, sinkronisasi program dan penganggaran, dan harmonisasi kebijakan Daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang di dalam dokumen RKPd tahun 2021 - 2026	Tertaskannya koordinasi, sinkronisasi program dan penganggaran, dan harmonisasi kebijakan Daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang di dalam dokumen RKPd tahun 2021 - 2026	Dinas Perdagangan	11 OP	9 pasar	8 Lokasi	20 komoditi	11 kecamatan	Dinas Perdagangan dan Pangan						
	11 OP	9 pasar	8 Lokasi	20 komoditi	11 kecamatan	Dinas Perdagangan	11 OP	9 pasar	8 Lokasi	20 komoditi	11 kecamatan	Dinas Perdagangan dan Pangan						
	11 OP	9 pasar	8 Lokasi	20 komoditi	11 kecamatan	Dinas Perdagangan	11 OP	9 pasar	8 Lokasi	20 komoditi	11 kecamatan	Dinas Perdagangan dan Pangan						
	11 OP	9 pasar	8 Lokasi	20 komoditi	11 kecamatan	Dinas Perdagangan	11 OP	9 pasar	8 Lokasi	20 komoditi	11 kecamatan	Dinas Perdagangan dan Pangan						
	11 OP	9 pasar	8 Lokasi	20 komoditi	11 kecamatan	Dinas Perdagangan	11 OP	9 pasar	8 Lokasi	20 komoditi	11 kecamatan	Dinas Perdagangan dan Pangan						

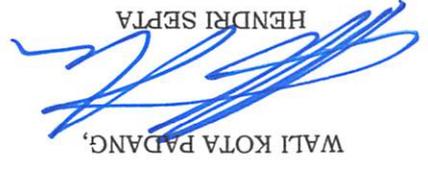
Strategi 4 K	Program Kerja	Program Kerja	3. Peningkatan Kerjasama Program Stabilitas Harga Pangan Antar Lintas Instansi (BAZNAS, Koperasi, CSR Perusahaan)	1. Mengelola keseimbangan internal perekonomian	1. Perencanaan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM a. Penyempurnaan bisnis model b. Penguatan/replika pada UMKM binaan c. Pengembangan dan peningkatan produktivitas pangan a. Meningkatkan nilai tambah komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Peningkatan teknologi pertanian melalui kerja sama dengan BPPT antara lain untuk keperluan pengembangan bibit dan peningkatan produksi pertanian c. Penyediaan bantuan benih padi unggul d. Pemasyarakatan Teknologi Jajar Legowo e. Penyediaan bantuan ternak f. Meningkatkan mutu bibit ternak sapi	2022	2023	2024	Keterangan
						Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin	
Strategi 4 K	Program Kerja	1. Mengelola keseimbangan internal perekonomian	1. Perencanaan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM a. Penyempurnaan bisnis model b. Penguatan/replika pada UMKM binaan c. Pengembangan dan peningkatan produktivitas pangan a. Meningkatkan nilai tambah komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Peningkatan teknologi pertanian melalui kerja sama dengan BPPT antara lain untuk keperluan pengembangan bibit dan peningkatan produksi pertanian c. Penyediaan bantuan benih padi unggul d. Pemasyarakatan Teknologi Jajar Legowo e. Penyediaan bantuan ternak f. Meningkatkan mutu bibit ternak sapi	1. Perencanaan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM a. Penyempurnaan bisnis model b. Penguatan/replika pada UMKM binaan c. Pengembangan dan peningkatan produktivitas pangan a. Meningkatkan nilai tambah komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Peningkatan teknologi pertanian melalui kerja sama dengan BPPT antara lain untuk keperluan pengembangan bibit dan peningkatan produksi pertanian c. Penyediaan bantuan benih padi unggul d. Pemasyarakatan Teknologi Jajar Legowo e. Penyediaan bantuan ternak f. Meningkatkan mutu bibit ternak sapi	2022	2023	2024	Keterangan	
					Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin		Program Kerja
					Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin		Program Kerja
					Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin		Program Kerja
Strategi 4 K	Program Kerja	1. Perencanaan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM a. Penyempurnaan bisnis model b. Penguatan/replika pada UMKM binaan c. Pengembangan dan peningkatan produktivitas pangan a. Meningkatkan nilai tambah komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Peningkatan teknologi pertanian melalui kerja sama dengan BPPT antara lain untuk keperluan pengembangan bibit dan peningkatan produksi pertanian c. Penyediaan bantuan benih padi unggul d. Pemasyarakatan Teknologi Jajar Legowo e. Penyediaan bantuan ternak f. Meningkatkan mutu bibit ternak sapi	1. Perencanaan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM a. Penyempurnaan bisnis model b. Penguatan/replika pada UMKM binaan c. Pengembangan dan peningkatan produktivitas pangan a. Meningkatkan nilai tambah komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Peningkatan teknologi pertanian melalui kerja sama dengan BPPT antara lain untuk keperluan pengembangan bibit dan peningkatan produksi pertanian c. Penyediaan bantuan benih padi unggul d. Pemasyarakatan Teknologi Jajar Legowo e. Penyediaan bantuan ternak f. Meningkatkan mutu bibit ternak sapi	1. Perencanaan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM a. Penyempurnaan bisnis model b. Penguatan/replika pada UMKM binaan c. Pengembangan dan peningkatan produktivitas pangan a. Meningkatkan nilai tambah komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Peningkatan teknologi pertanian melalui kerja sama dengan BPPT antara lain untuk keperluan pengembangan bibit dan peningkatan produksi pertanian c. Penyediaan bantuan benih padi unggul d. Pemasyarakatan Teknologi Jajar Legowo e. Penyediaan bantuan ternak f. Meningkatkan mutu bibit ternak sapi	2022	2023	2024	Keterangan	
					Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin		Program Kerja
					Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin		Program Kerja
					Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin	Jumlah kerjasama yang terjalin		Program Kerja

Strategi 4 K	Program Kerja	Program Kerja	Timeline Target			Keterangan
			2022	2023	2024	
b. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	1. Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan 2. Peningkatan teknologi pengolahan pangan lokal 3. Penyediaan dan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kota 4. Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan 5. Pemantauan distribusi dan ketersediaan pangan 6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian a. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi b. Pembangunan jalan usaha tani c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan UPPO d. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rice milling unit e. Pelaksanaan rehabilitasi kandang ternak 4. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (sapi) b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 6. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian a. Gerakan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) b. Penyediaan bantuan sarana obat-obatan pengendalian OPT	105 KWT	115 KWT	125 KWT	Dinas Perikanan dan Pangan
			22 UMKM Pangan	44 UMKM Pangan	66 UMKM Pangan	Dinas Perikanan dan Pangan
			12 ton	18 Ton	24 Ton	Dinas Perikanan dan Pangan
			297 sample	371 sample	451 sample	Dinas Perikanan dan Pangan
			11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	Dinas Perikanan dan Pangan
			4 Kelompok Desa Mandiri Pangan	6 Kelompok Desa Mandiri Pangan	8 Kelompok Desa Mandiri Pangan	Dinas Perikanan dan Pangan
3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi b. Pembangunan jalan usaha tani c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan UPPO d. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rice milling unit e. Pelaksanaan rehabilitasi kandang ternak 4. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (sapi) b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 6. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian a. Gerakan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) b. Penyediaan bantuan sarana obat-obatan pengendalian OPT	3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi b. Pembangunan jalan usaha tani c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan UPPO d. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rice milling unit e. Pelaksanaan rehabilitasi kandang ternak 4. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (sapi) b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 6. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian a. Gerakan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) b. Penyediaan bantuan sarana obat-obatan pengendalian OPT	3 paket	4 paket	5 paket	Dinas Pertanian
			1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Pertanian
			1 unit	2 unit	2 unit	Dinas Pertanian
			1 unit	2 unit	2 unit	Dinas Pertanian
			10 unit	10 unit	10 unit	Dinas Pertanian
			500 ekor	500 ekor	500 ekor	Dinas Pertanian
4. Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan	3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi b. Pembangunan jalan usaha tani c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan UPPO d. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rice milling unit e. Pelaksanaan rehabilitasi kandang ternak 4. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (sapi) b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 6. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian a. Gerakan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) b. Penyediaan bantuan sarana obat-obatan pengendalian OPT	3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi b. Pembangunan jalan usaha tani c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan UPPO d. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rice milling unit e. Pelaksanaan rehabilitasi kandang ternak 4. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (sapi) b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 6. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian a. Gerakan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) b. Penyediaan bantuan sarana obat-obatan pengendalian OPT	2000 ekor	2000 ekor	4000 ekor	Dinas Pertanian
			7 kali	7 kali	7 kali	Dinas Pertanian
			4 jenis	4 jenis	4 jenis	Dinas Pertanian
			2000 ekor	2000 ekor	4000 ekor	Dinas Pertanian
			7 kali	7 kali	7 kali	Dinas Pertanian
			4 jenis	4 jenis	4 jenis	Dinas Pertanian

Strategi 4 K	Program Kerja	7. Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Masyarakat sumber dan ketersediaan pangan masyarakat Kota Padang	1. Penguatan kelembagaan petani (Gapoktan, Toko Tani, dan LDPM), sekaligus mendorong pengembangan petani menjadi lembaga ekonomi petani melalui antara lain contract farming (Gapoktan/PUPM) Optimalisasi pemanfaatan Toko Tani Indonesia Sekolah Lapang Jajar Legowo untuk peningkatan produktivitas padi Sosialisasi dan pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Pelatihan pakan ternak pada kelompok tani Optimalisasi pemanfaatan sistem resi gudang Penguatan Kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Penerima PUP Penguatan kelembagaan Distribusi dan LPM 2 Ton Gabah LDPM 183,5 Ton Beras PUPM 26,6 Ton Beras 4 Kelompok 3 koperasi	2022	11 kecamatan	6 LDPM	102 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	103 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	104 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	Dinas Perikanan dan Pangan	11 kecamatan	6 LDPM	11 kecamatan	Dinas Perikanan dan Pangan	Keterangan	Timelime Target
																2023
3. Kelancaran Distribusi	a. Penguatan Kerjasama Antar Daerah	1. Mendorong peningkatan kerja sama antar daerah Kota Padang dengan daerah surplus bahan pangan di Propinsi Sumatera Barat	Terlaksananya kerjasama antar Pemerintah Kota Padang dengan Daerah sentral produksi bahan pangan.	2023	11 kecamatan	6 LDPM	103 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	104 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	104 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	Dinas Perikanan dan Pangan	11 kecamatan	6 LDPM	11 kecamatan	Dinas Perikanan dan Pangan	Keterangan	Timelime Target
																2024
3. Kelancaran Distribusi	a. Penguatan Kerjasama Antar Daerah	1. Mendorong peningkatan kerja sama antar daerah Kota Padang dengan daerah surplus bahan pangan di Propinsi Sumatera Barat	Terlaksananya kerjasama antar Pemerintah Kota Padang dengan Daerah sentral produksi bahan pangan.	2022	11 kecamatan	6 LDPM	102 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	103 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	104 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	Dinas Perikanan dan Pangan	11 kecamatan	6 LDPM	11 kecamatan	Dinas Perikanan dan Pangan	Keterangan	Timelime Target
																2023
3. Kelancaran Distribusi	a. Penguatan Kerjasama Antar Daerah	1. Mendorong peningkatan kerja sama antar daerah Kota Padang dengan daerah surplus bahan pangan di Propinsi Sumatera Barat	Terlaksananya kerjasama antar Pemerintah Kota Padang dengan Daerah sentral produksi bahan pangan.	2022	11 kecamatan	6 LDPM	102 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	103 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	104 kelompok tani, 7 gapoktan, 6 LDPM, 2 TTI, 2 Lumbung Pangan	Dinas Perikanan dan Pangan	11 kecamatan	6 LDPM	11 kecamatan	Dinas Perikanan dan Pangan	Keterangan	Timelime Target
																2023

Strategi 4 K	Program Kerja	Program Kerja	4. Komunikasi Efektif	1. Pembentukan database surplus/defisit komoditas pangan strategis 2. Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis 3. Penyusunan dan Updating Data Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura & Perkebunan 4. Analisa Data Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan 5. Peningkatan Kualitas Data PIHPS Keakuratan Data Bahan Pangan Strategis, Korelasi Data Harga dengan Inflasi	1. Melaksanakan harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah terkait upaya pengendalian inflasi 2. Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi daerah	1. Melakukan peningkatan koordinasi dan rapat-rapat TPID antar Provinsi dan Kab/Kota 2. Peningkatan Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan Harga Sembilan Bahan Pokok	1. Pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel inflasi melalui komunikasi yang rutin dan terpeccaya (kisaran sasaran inflasi)	d. Mengendalikan Ekspetasi Inflasi		
			a. Memperbaiki Kualitas Data b. Koordinasi Pusat dan Daerah c. Memperkuat Koordinasi antar Kab/Kota							
Keterangan	Timeline Target	2024	1 1 kecamatan 1 aplikasi Dinas Perdagangan Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Dinas Perdagangan	1 1 kecamatan 1 aplikasi Dinas Perdagangan	1 1 kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 1 aplikasi dan evaluasi	1 1 kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 1 aplikasi dan evaluasi	Harmonisasi regulasi Harmonisasi regulasi Harmonisasi regulasi Harmonisasi regulasi	Pencapaian target roadmap 90 % Pencapaian target roadmap 91 % Pencapaian target roadmap 92 %	Bagian Perkonomian dan SDA Bagian Perkonomian dan SDA Bagian Perkonomian dan SDA Bagian Perkonomian dan SDA	Bagian Perkonomian dan SDA Bagian Perkonomian dan SDA Bagian Perkonomian dan SDA Bagian Perkonomian dan SDA

NO	NAMA	JABATAN	TGL PARAF
1	Fitriah N	g. Sek. BSS 2	15/2
2	Indrawati	g. Sek. BSS 2	25/2-22
3	Yoni K	g. Sek. BSS 2	15/2-22
4	Syamsul	Kep. Sek. BSS 2	15/2-22
5	Iskandar	Kep. Sek. BSS 2	15/2-22

WALI KOTA PADANG,

 HENDRI SEPTA